



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

EVALUASI RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

TAHUN 2018-2023





KATA PENGANTAR

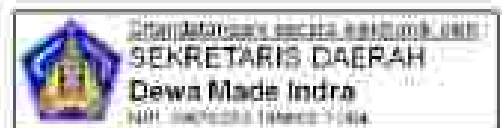
OM Swastastu!

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa – Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung-Kerta Wara NugrahaNya. Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Renstra ini disusun sebagai Dokumen dalah memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini masih jauh dari sempurna, walaupun telah berupaya untuk menampung berbagai pemikiran, masukan serta saran-saran dan berbagai pihak, namun masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam penyusunan Renstra ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018- 2023.

Kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan bahan penyempurnaan.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan terjadinya perubahan yang cepat di era otonomidasentralisasi telah menjadi peluang sekaligus tantangan yang besar bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan masyarakat terhadap perubahan kearah yang lebih baik menjadi dasar yang kuat bagi terwujudnya cita-cita reformasi agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan.

Adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka kewenangan pemerintah daerah pun mengalami perubahan dan mudahnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimana harus melakukan penyesuaian terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Penyesuaian-penyesuaian sebagai akibat dari dibentuknya peraturan perundang-undangan dimaksud adalah dilakukanya evaluasi dan review Renstramenjadi landasan dan pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan. Pelaksanaan lebih lanjut renstra diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Provinsi Bali harus menyusun dokumen perencanaan lima tahun, yaitu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Keterkaitan antara Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah serta hukum



yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instalansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instalasi Pemerintahan;
11. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semester Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Evaluasi Renstra adalah untuk mengevaluasi jika ditemukan adanya penyimpangan/ ketidaksesuaian serta melakukan perbaikan/ penyempurnaan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan dijadikan pegangan dalam menentukan visi, misi, strategis dan arahan kebijakan.

Adapun tujuan disusunnya Evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Melakukan evaluasi terhadap Isu, Sasaran Tujuan dan Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran/Dana yang sudah terlaksana
4. Sebagai pedoman dan pertimbangan pelaksanaan Renstra/Renja tahun berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Bali disusun mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian latar belakang tentang Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah dan menyampaikan pertimbangan dilakukan evaluasi Renstra Sekretariat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI

Berisi tentang hasil evaluasi terhadap Renstra Sekretariat Daerah tahun 2018-2023.

BAB III KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RENSTRA DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1 Konsistensi Pelaksanaan Program RPJMD dengan Program pada Renstra Tahun 2018-2022
- 3.2 Konsistensi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra dengan Renja Tahun 2018-2022
- 3.3 Kinerja Keuangan Daerah

BAB IV CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Evaluasi Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra
- 4.3 Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2018-2021
- 4.4 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2018-2021

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi



BAB II

EVALUASI RENSTRA DAN GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

2.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2011 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Lembaga Lain, dan Staf Ahli Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan koordinasi, administrasi, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
- d. penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra, membawahi:
 - A. Kepala Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Bagian Kerjasama, membawahi:
 - 1) Unit Substansi Kerjasama Antar Daerah Dan Pihak Ketiga;
 - 2) Unit Substansi Kerjasama Daerah Dengan Badan Usaha Swasta; dan
 - 3) Unit Substansi Kerja Sama Luar Negeri;
 - b. Substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
 - 1) Unit Substansi Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah Dan DPRD;
 - 2) Unit Substansi Administrasi Pemerintahan Dan Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - c. Substansi Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) unit substansi sarana dan prasarana spiritual;
 - 2) unit substansi Kalembeagaan Bina Spiritual; dan

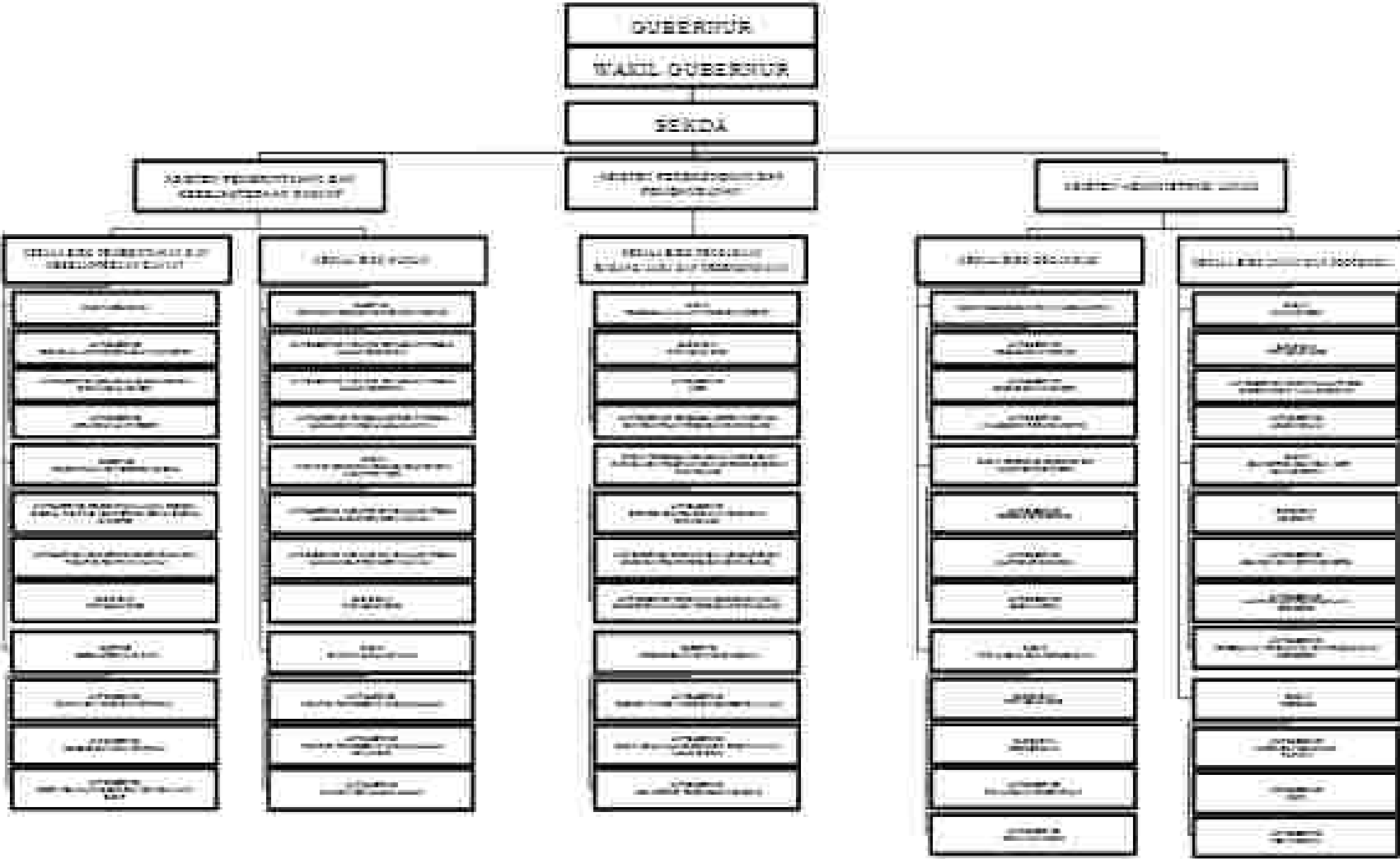


- 3) unit substansi Kerja Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.
- E. Biro Hukum, terdiri dari:
 - a) Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi:
 - 1) Unit Substansi Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan,
 - 2) Unit Substansi Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan, dan
 - 3) Unit Substansi pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
 - b) Bagian Fasilitas Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/ Kota, membawahi:
 - 1) Unit Substansi Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I,
 - 2) Unit Substansi Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II, dan
 - 3) Sub-Bagian Tata Usaha Biro.
 - c) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi:
 - 1) Unit Substansi Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum,
 - 2) Unit Substansi Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi, dan
 - 3) Unit Substansi HAM dan Penyuluhan Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - A. Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), membawahi:
 - 1) Sub-Bagian Tata Usaha Biro,
 - 2) Unit Substansi LPSE, dan
 - 3) Unit Substansi Pengelola Sistem Informasi dan Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b) Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - 1) Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,
 - 2) Unit Substansi Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa, dan
 - 3) Unit Substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
 - c) Substansi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1) Unit Substansi Ekonomi Makro, Mikro dan Sumber Daya Alam,
 - 2) Unit Substansi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, dan
 - 3) Unit Substansi Administrasi Pembangunan Daerah.
 - A. Biro Organisasi, terdiri dari:
 - a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi:
 - 1) Unit Substansi Kelembagaan Provinsi,
 - 2) Unit Substansi Kelembagaan Kabupaten/ Kota, dan
 - 3) Unit Substansi Analisis dan Formasi Jabatan.



- b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Reformasi Birokrasi,
 - 2) Unit Substansi Akuntabilitas Kinerja, dan
 - 3) Unit Substansi Budaya Kerja.
- c) Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro,
 - 2) Sub Bagian Perpustakaan,
 - 3) Unit Substansi Tata Laksana Pemerintahan, dan
 - 4) Unit Substansi Pelayanan Publik.
- 6. Biro Umum dan Protokol terdiri dari :
 - a) Bagian Rumah Tangga, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro,
 - 2) Unit Substansi Urusan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur dan
 - 3) Unit Substansi Urusan Dalam.
 - b) Bagian Administrasi Keuangan, Aset dan Kearsipan membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kearsipan,
 - 2) Unit Substansi Keuangan dan Verifikasi Setda,
 - 3) Unit Substansi Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda, dan
 - 4) Unit Substansi Pengunahan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Setda.
 - c) Bagian Protokol, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Materi dan Komunikasi Pimpinan,
 - 2) Unit Substansi Acara, dan
 - 3) Unit Substansi Penyambutan.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali





2.2 EVALUASI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra 2018-2023, mengacu pada Peraturan Perundangan dan Kebijakan yang berlaku serta permasalahan yang dihadapi saat ini, terkait adanya kebijakan pemerintah tentang penanganan covid-19 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019.

Berikut Evaluasi dan Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 (Tabel 2.1).

No	Uraian Evaluasi	Hasil Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Sesuai	Tidak Sesuai		
1 2	Tujuan Sasaran	√	√	1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 2. Beberapa data pendukung indikator tidak tersedia	Melakukan revisi renstra terkait indikator sasaran
3	Strategi dan Arah Kebijakan	√			
4	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		√	Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Melakukan revisi Renstra terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
5	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		√	Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan	Melakukan revisi Renstra terkait indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan



				Pembangunan dan Keuangan Daerah	
6	Pendanaan Indikatif		4	Kebijakan pemerintah sehubungan adanya penanganan Covid-19	Melakukan refocusing anggaran dan dilanjutkan dengan revisi rencana



2.3 EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali dilaksanakan dengan cara memisah terhadap konsistensi program antara Renstra dan RPJMD, konsistensi pagu program antara RPJMD-Renstra-Renja

Tabel 2.3.1 Konsistensi Program dan Kegiatan antara RPJMD-RENSTRA-RENJA

Program/Kegiatan	RPJMD		RENSTRA		Renja		APSD		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	✓		✓		✓		✓		Sesuai	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan										
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan										
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum									Pengurangan sub kegiatan	
Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Wilayah										
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah										
Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD										
Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Peraturan Urusan										
Sub Kegiatan Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan									Pengurangan sub kegiatan	



Program/Kegiatan	RPJMD		REN STRA		Rencana		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah										
Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah										
Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta									Pengantar sub kegiatan	
Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kerja Sama										
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4		4		4		4		Sesuai	
Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual										
Sub Kegiatan Penghinaan Agama dan Penguatan Spiritual										
Sub Kegiatan Fasilitas Keterbacaan Bina Spiritual										
Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar										
Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sistemisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial										



Program/Kegiatan	RPJMD		RENSTRA		Renja		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar										
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8		6		4		6		Sesuai	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Pengantar sub kegiatan	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									Pengantar sub kegiatan	



Program/Kegiatan	RPJMD		RENSTRA		Renja		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik, Peningkatan Bangunan Kantor										
Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor										
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman										
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD										
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Kebutuhan Peningkatan Dinas atau Kearsnasan Dinas Jabatan										
Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pabrik dan Perbaikan Kearsnasan Dinas Operasional atau Lapangan BSM									Pengawasan sub kegiatan	



Program/Kegiatan	RPJMD		REN STRA		Rencana		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mobil										
Sub Kegiatan Pemeliharaan Perahu dan Mesin Lainnya										
Sub Kegiatan Pemeliharaan (Rehabilitasi) Bangunan dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	✓		✓		✓		✓		Sesuai	Biro Hukum
Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan										
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengelakan										
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan										
Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Masalah Hukum Lainnya										
Sub kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Administrasi/Kota										
Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum										



Program/Kegiatan	RPJMD		RENSTRA		Renja		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelidikan Masalah Hukum										
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelidikan Masalah Non Legal dan HAM										
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	✓		✓		✓		✓		Selesai	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									Pengurangan sub kegiatan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Wilayah Realisasi Kinerja SKPD										
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									Selesai ke Selesai	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/ Semester/ Tahunan SKPD									Pengurangan sub kegiatan	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										



Program/Kegiatan	RPJMD		REN STRA		Rencana		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Sub kegiatan Penyelidikan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
Sub kegiatan Penyelidikan Perbaikan dan Peningkatan Kantor										
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman										
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									Pengurangan sub kegiatan	
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peningkatan Efisiensi atau Kemudahan Dinas Juklat										
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel										
Sub kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya										
Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan									Pengurangan sub kegiatan	



Program/Kegiatan	RPJMD		RENSTRA		Rencana		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Gedung Kantor atau Balai/Gunung Lainnya										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI	✓		✓		✓		✓		Sesuai	Situ Pengadaan Barang/Jasa dan Perakorbanan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Pelaksanaan Diseminasi Perencanaan Perangkat Daerah										
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Pelaksanaan Gaji dan Tunjangan ASN									Sesuai Kelembagaan	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Pelaksanaan Pendidikan dan Pengembangan Kelembagaan										
Pelaksanaan Barang Cetak dan Pengiriman										
Pelaksanaan Ruang Rapat Kelembagaan dan Kelembagaan SKPD										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Pelaksanaan Jasa Pemeliharaan, Bangunan dan Ruang										



Program/Kegiatan	RPJMD		REN STRA		Rencana		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Kemampuan Peningkatan Dinas atau Kementerian Dinas Jabatan										
Peningkatan Peningkatan dan Monev Lainnya										
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8		8		8		8		Sesuai	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian										
Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro										
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam										
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perairan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan										
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD										
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Usaha Usaha										
PROGRAM KEBUJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	9		9		9		9		Sesuai	



Program/Kegiatan	RPJMD		REN STRA		Rencana		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										
Pengelolaan Barang										
Pengadaan Barang dan Jasa										
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa										
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa										
Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik										
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa										
Kegiatan Peminaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa										
Peminaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa										
Peminaan Kemandirian Pengadaan Barang dan Jasa										
Pendampingan Konsultan Jasa dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa										
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	✓		✓		✓		✓		Benar	



Program/Kegiatan	RPJMD		REN STRA		Renda		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Pengendali Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah										
Pengendali Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD										
Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										
Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										
Program Pembiayaan Perputakaan	✓		✓		✓		✓			Biro Organisasi
Pengelolaan Perputakaan Tingkat Daerah Provinsi										
Pembinaan GEMAR Membaca Tingkat Daerah / Provinsi										
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	✓		✓		✓		✓		Sesuai	
Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
Administrasi Umum Perangkat Daerah										



Program/Kegiatan	RPJMD		REN STRA		Rencana		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Perteliharaan Boring Mili Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah										
Program Penataan Organisasi	✓		✓		✓		✓		Sesuai	
Facility Keterampilan dan Analisis Jurusan										
Facility Tekhnologi Statistik dan Akumulasi Kinerja										
PROGRAM PENGELOLAAN AR SIP	✓		✓		✓		✓		Sesuai	Biro Umum dan Protokol
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi										
Perteliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis										
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi										
Pengelolaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JKN										
Pembudayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	✓		✓		✓		✓		Sesuai	



Program/Kegiatan	RPJMD		REN STRA		Rencana		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efisiensi Realisasi Kinerja SKPD									Pemantauan dan evaluasi	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Pemantauan dan evaluasi	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									Berada di Sektur	
Pelaksanaan Pemusatan dan Pengujian Mutu Keuangan SKPD										
Konsolidasi Bagan Mula Daerah pada Perangkat Daerah										
Pemantauan Bagan Mula Daerah pada SKPD										
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik dan Peningkatan Bangunan Kantor										



Program/Kegiatan	RPJMD		REN STRA		Rencana		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									Pengurangan sub kegiatan	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									Pengurangan sub kegiatan	
Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perawatan									Pengurangan sub kegiatan	
Fasilitas Katering Tim										
Penyediaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Pembelajaran Anak Didik pada SKPD									Pengurangan sub kegiatan	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyediaan Jasa Surat Menyurat									Pengurangan sub kegiatan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan Lainnya										
Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										



Program/Kegiatan	RPJMD		REN STRA		Rencana		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Persewaan Gitan atau Kendaraan Dinas Jabatan									Pengurusan sub kegiatan	
Pemeliharaan jalan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
Pemeliharaan Mobil									Pengurusan sub kegiatan	
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									Pengurusan sub kegiatan	
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
Pemeliharaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									Pengurusan sub kegiatan	



Program/Kegiatan	RPJMD		RENSTRA		Renja		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Penyediaan Dana Pembiayaan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
Fasilitasi Kenormalan Kantor Sekretaris Daerah										
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah										
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah										
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah										
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan										
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										
Fasilitasi Keprotokolan										
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara									Pengurangan sub kegiatan	
Fasilitasi Kumparan Tama Kepala Daerah dan Wakil Kepala									Pengurangan sub kegiatan	
Pengelolaan Hubungan Kepramukaan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	✓		✓		✓		✓		Sesuai	SETDA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										



Program/Kegiatan	RPJMD		RENSTRA		Renda		APRO		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN									Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	



Tabel 2.3.2 Konsistensi Pagu Indikatif Program dan Kegiatan

Program/ Kegiatan	RPJMD	Renstra 2021	Renja 2021	APBD 2021	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.350.000.000	1.600.300.242	1.148.953.485	1.148.953.485	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			452.344.399	452.344.399	
Sub Kegiatan Pengembangan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		150.000.000	387.751.208	387.751.208	
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Desa			15.916.000	15.916.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Penguatan Wilayah		150.000.000	147.667.128	147.667.128	
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		450.000.000	384.430.330	384.430.330	
Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		150.000.000	229.215.864	229.215.864	
Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Penguatan Urusan		150.000.000	52.183.360	52.183.360	
Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		150.000.000	63.051.806	63.051.806	
Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah			332.188.259	332.188.259	
Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintahan		150.000.000	174.381.369	174.381.369	
Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Sektor Usaha/Swasta		150.000.000	15.347.100	15.347.100	
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kerja Sama		150.000.000	141.259.800	141.259.800	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.500.000.000	15.350.000.000	20.911.890.183	20.911.890.183	



Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual		11.100.000.000	10.029.416.858	10.029.416.858	
Sub Kegiatan Pengabdian Sarana dan Prasarana Spiritual		11.000.000.000	9.258.122.812	9.258.122.812	
Sub Kegiatan Fasilitas Kemandirian Bina Spiritual		100.000.000	321.293.136	321.293.136	
Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		4.500.000.000	4.127.498.140	4.127.498.140	
Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Implementasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		4.500.000.000	4.127.498.140	4.127.498.140	
Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		250.000.000	5.954.776.165	5.954.776.165	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		250.000.000	5.904.776.165	5.904.776.165	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.300.000.000		8.450.374.953	8.580.374.953	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		120.000.000	194.442.105	194.442.105	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		80.000.000	41.003.958	41.003.958	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD		40.000.000	153.438.147	153.438.147	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.510.000.000	5.603.365.300	5.603.365.300	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.480.000.000	5.782.823.368	5.782.823.368	



Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan/Trusmi/Sementara SKPD		50.000.000	76.522.181	76.522.181	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		440.000.000	307.473.900	307.473.900	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Institusi Lokal/Peningkatan Bangunan Kantor		25.000.000	27.527.300	27.527.300	
Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor		60.000.000	14.475.500	14.475.500	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Ruang Cetak dan Pengiriman		45.000.000	16.137.800	16.137.800	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koneksi SKPD		300.000.000	249.730.300	249.730.300	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntukan Unsur Pemerintahan Daerah		885.000.000	455.083.848	455.083.848	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peruntukan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		250.000.000	122.700.000	122.700.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BDM)		350.000.000	274.837.200	274.837.200	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mobil		5.000.000	0	0	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50.000.000	35.080.000	35.080.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30.000.000	32.476.448	32.476.448	
Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	32.271.637.784	4.423.058.674	4.423.058.674	4.423.058.674	Biro Hukum



Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan		1.385.140.358	1.385.140.358	1.385.140.358	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengesahan		1.359.154.888	1.359.154.888	1.359.154.888	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan		187.905.792	187.905.792	187.905.792	
Sub kegiatan Pendukung/antuan Produk Hukum dan Masalah Hukum Lainnya		118.025.754	118.025.754	118.025.754	
Sub kegiatan Fasilitas dan Fasilitas Produk Hukum Kabupaten/Kota		318.451.134	318.451.134	318.451.134	
Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum		2.457.318.275	2.457.318.275	2.457.318.275	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum		2.107.472.492	2.107.472.492	2.107.472.492	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		350.445.784	350.445.784	350.445.784	
Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.378.878.964	7.809.060.912	7.809.060.912	7.809.060.912	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.854.500	9.854.500	9.854.500	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah		5.577.300	5.577.300	5.577.300	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Samasua Kinerja SKPD		4.076.800	4.076.800	4.076.800	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.569.811.442	8.569.811.442	8.569.811.442	
Sub Kegiatan Pelayanan Giff dari Tawangan ASN		8.569.811.442	8.569.811.442	8.569.811.442	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dan SKPD		2.398.200	2.398.200	2.398.200	



Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		115.877.950	115.877.950	115.877.950	
Sub kegiatan Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.395.550	9.399.350	9.399.550	
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		53.504.700	53.504.700	53.504.700	
Sub kegiatan Pemeliharaan Gedung, Cetak dan Penggandaan		29.399.700	29.399.700	29.399.700	
Pengembangan Rapat Koordinasi dan Komando SKPD		22.174.000	22.174.000	22.174.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.114.118.820	1.114.118.820	1.114.118.820	
Sub kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perantara Dinas atau Kantor Dinas Jabatan		474.030.144	474.030.144	474.030.144	
Sub kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		547.585.375	547.585.375	547.585.375	
Sub kegiatan Pemeliharaan Mobil		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		82.530.000	82.530.000	82.530.000	
Sub kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4.993.000	4.993.000	4.993.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI	10.396.119.917	12.898.134.891	12.898.134.891	11.757.426.301	Biaya Pemeliharaan Barang/Jasa dan Perekonomian



Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000.000	1.248.000	
Pengumpulan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.000.000	588.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		1.000.000	1.000.000	652.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.322.248.121	8.322.248.121	8.881.458.831	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.321.248.121	8.321.248.121	8.880.458.831	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran/SKPD		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.578.370.370	2.578.370.370	1.446.959.376	
Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor		2.218.614.170	2.218.614.170	1.298.395.770	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		60.000.000	60.000.000	23.810.000	
Pembiayaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		199.766.000	199.766.000	114.674.000	
Penyediaan Koneksi Internet, Listrik, dan Perawatan Bangunan Kantor		88.990.200	88.990.200	88.990.200	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		295.800.000	295.800.000	295.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Mebel		295.800.000	295.800.000	295.800.000	Pengadaan Mebel
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		699.716.400	699.716.400	333.150.000	
Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan (tan Paia Kematangan)		119.998.400	119.998.400	108.140.000	



Perencanaan Dinas atau Kelurahan, Dinas Jajahan					
Persediaan just Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Fajit dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan		100.000.000	100.000.000	53.900.000	
Pemeliharaan Mebel		50.000.000	50.000.000	10.000.000	
Pemeliharaan Perabotan dan Meubel lainnya		199.720.000	199.720.000	98.090.000	
Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya		150.000.000	150.000.000	96.000.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.152.534.452	880.754.010			
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					
Facilitasi Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro		171.952.896	171.952.896	162.546.896	
Facilitasi Pengkajian Kebijakan Ekonomi Mikro		166.952.896	166.952.896	159.340.436	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		54.478.448	54.478.448	36.010.048	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		20.000.000	20.000.000	553.600	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		20.000.000	20.000.000	10.714.600	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi EUMD dan BLUG					



Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Usaha Usaha		437.429.224	437.429.224	329.076.224	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		89.952.545	89.952.545	79.382.545	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	35.130.595.937	7.743.081.400	7.742.061.400	6.341.737.255	
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		6.557.161.750	6.557.161.750	6.402.756.300	
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		49.999.800	49.999.800	2.925.000	
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		8.857.181.950	8.857.161.950	6.380.831.300	
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		50.000.000	50.000.000	0	
Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		499.899.310	499.899.310	389.935.455	
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		399.699.810	399.899.810	213.635.459	
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		100.000.000	100.000.000	76.300.000	
Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		284.999.700	284.999.700	149.415.000	
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		184.999.700	184.999.700	116.350.000	
Pembinaan Kolaborasi Pengadaan Barang dan Jasa		50.000.000	50.000.000	4.500.000	
Pendampingan, Asesment, dan/atau Bimbingan Teknik Pengadaan Barang dan Jasa		50.000.000	50.000.000	28.065.000	



PROGRAM KEBIJAKAN / ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	485,672,093	401,381.800	401,381.800	146.443.770	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		202,428.204	202,428.204	146.443.804	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		202,428.204	202,428.204	146.443.804	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		198,952.896	198,952.896	186.225.396	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		198,952.896	198,952.896	186.225.396	
Program Pempinaan Perpustakaan	1,178,553,773	NA			Non Organisasi
Perpustakaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		NA			
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		NA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41,775,713,384	6.326.510.784	7.731.226.512	6.326.510.784	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.803.800	16.349.800	4.803.800	
Akreditasi Keuangan Perangkat Daerah		6.325.455.685	6.331.132.187	6.225.455.885	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.186.365	27.591.365	3.186.365	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		110.000.880	201.167.880	1.102.880	
Pemeliharaan Sarung Muka Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		462.951.344	666.055.344	462.951.344	
Program Penataan organisasi	3.007.736,396	262.625.351	324.348.346	262.625.351	



Facilitasi Koordinasi dan Analisis Jabatan		148.805.313	297.478.448	148.805.313	
Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		106.020.000	277.472.798	106.020.000	
PROGRAM PENGELOLAAN AR SIP	3.406.580.191	N/A			Biro Umum dan Protokol
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		N/A			
Pemeliharaan dan Pengurusan Arsip Dinamis		N/A			
Pengelolaan Simpul Jaringan Sistem Sistem Informasi Keasipaan Nasional Tingkat Provinsi		N/A			
Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Keasipaan Tingkat Daerah Provinsi Melalui SIPN		N/A			
Pemberdayaan Kapasitas Unit Keasipaan dan Lembaga Keasipaan Daerah Provinsi		N/A			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	871.588.618.418	83.482.125.918	80187763841	83.482.125.918	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		226.726.082	226.726.082	226.726.082	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		158.905.702	158.905.702	158.905.702	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Wilayah Realisasi Kinerja SKPD		36.692.700	36.692.700	36.692.700	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32.228.600	32.228.600	32.228.600	
Audit Kinerja Keuangan Perangkat Daerah		19.414.880.577	21.041.591.787	19.414.880.577	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		18.772.464.293	226.728.382	18.772.464.293	
Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		692.476.284	692.476.284	692.476.284	



Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		348.058.579	348.058.579	348.058.579	
Pembudayaan Barang Milik Daerah pada DPRD		348.058.579	348.058.579	348.058.579	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12.878.452.833	8.980.288.833	12.878.452.833	
Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor		824.972.742	527.418.342	824.972.742	
Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor		2.576.466.585	449.438.585	2.576.466.585	
Penyediaan Fasilitas Rumah Tinggal		512.835.540	449.821.440	512.835.540	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman		358.999.956	358.999.956	358.999.956	
Penyediaan Bahan Bakar dan Perawatan Perantara-undangan		575.000.000	575.000.000	575.000.000	
Fasilitas Kunjungan Turis		3.463.821.804	3.308.581.804	3.463.821.80	
Peningkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		3.876.338.184	3.576.338.084	3.876.338.184	
Pembudayaan Ardi Daerah pada DPRD		198.021.540	212.421.540	198.021.540	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada DPRD		588.398.582	588.398.582	588.398.582	
Penyediaan Jasa Penunjang Utama Pemerintahan Daerah		13.482.840.290	8.299.348.428	13.482.840.290	
Penyediaan Jasa Sisa Melayat		18.000.000	4.500.000	18.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.395.000.000	1.295.000.000	1.395.000.000	
Penyediaan Jasa Perakitan dan Peningkatan Kantor		7.388.348.862	3.548.904.862	7.388.348.862	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.454.943.396	4.348.943.436	4.454.943.396	



Pemeliharaan Sising M&A Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.187.187.321	10.684.888.018	14.187.187.321	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Permungan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.770.131.800	1.650.300.000	1.770.131.800	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan		4.588.104.800	3.894.687.360	4.588.104.800	
Pemeliharaan Mebel		80.000.000	- 80.000.000	80.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2.181.178.108	4.398.998.840	6.581.178.048	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Garasi dan Parkiran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.207.782.484	998.398.004	1.207.782.484	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		5.056.614.684	5.064.139.336	5.056.614.684	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		289.485.438	289.485.438	289.485.438	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		4.787.329.106	4.784.654.008	4.787.329.106	
Facilitas Kebutuhan Tanggapan Seriusitas Daerah		15.985.974.332	8.827.748.832	15.985.974.332	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		12.305.974.332	8.827.748.832	12.305.974.332	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		3.454.909.960	2.499.969.960	3.454.909.960	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah		208.000.000	208.000.000	208.000.000	



Fasilitas Monev dan Komunikasi Pimpinan		525.800.000	427.250.000	525.800.000	
Fasilitas Komunikasi Pimpinan		525.800.000	427.250.000	525.800.000	
Fasilitas Keprastisulan		1.519.803.138	1.419.803.138	1.519.803.138	
Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		782.135.120	749.834.120	782.135.120	
Fasilitas Kunjungan Terakreditasi Daerah dan Wakil Kepala		87.755.000	80.000.000	87.755.000	
Pengelolaan Hubungan Keprastisulan		769.768.018	769.768.018	769.768.018	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	M/A	N/A			Selisi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		N/A			
Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN		N/A			
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		N/A			
Persediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		N/A			



BAB III

KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RENSTRA DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

3.1 Konsistensi Pelaksanaan Program RPJMD dengan Program pada Renstra Tahun 2019-2022

Program yang terdapat pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2022 dan RPJMD dan hasil evaluasi sudah sesuai dan konsisten Program pada Renstra dan RPJMD yang dapat dilihat pada tabel 2.3.1 yang menjelaskan konsistensi Program dan Kegiatan antara RPJMD-Renstra-Renja.

3.2 Konsistensi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra dengan Renja Tahun 2019-2022

Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra Tahun 2021 dan Renja 2021 terdapat beberapa kegiatan yang ada pada Renstra 2019-2023 tidak terdapat pada Renja 2021 antara lain Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja, Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik, Program Peningkatan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah. Dimana terjadi juga efisiensi anggaran/refocusing dan penggabungan sub kegiatan akibat adanya pandemi Covid - 19. Program/Kegiatan lainnya sudah konsisten antara Renstra 2019-2023 dan Renja 2021.

3.3 Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali



Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Tahun					
		2015		2016		2017	
		Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Program Penunjang Utama: Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Efisiensi Manajemen Kinerja	NA	943.475.042	75	1.737.876.462	76	7.395.006.965
Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Skor Mita Layanan Pelayanan Fundamental Daerah Provinsi Bali	11	3.85.000.000	2,5	430.486.540	2,2	1.802.461.436
Program Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Pelayanan Set Luar	NA	14.201.717.666	74	1.546.7527.453	76	24.814.622.433
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN							
Program Penunjang Utama: Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Efisiensi Manajemen Kinerja	-	-	-	-	100%	11.757.326.801
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pemerataan Kebijakan Pembangunan Yang Dilaksanakan Pemerataan Devidek Tetrasda Pembangunan Asli Daerah	-	-	-	-	-	-
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pembangunan Barang Dan Jasa	Pemerataan Kebijakan Pembangunan Barang/Jasa	-	-	-	-	100%	6.641.707.256
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pemerataan Pembangunan Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Kebijakan Yang Berlaku	-	-	-	-	-	-
BIRO HUKUM							
Program Pengembangan Produk Hukum	Pemerataan Pengembangan Produk Hukum	100%	2.701.851.228	100%	372.576.747	-	-
Program Bantuan Hukum Dan Lain	Pemerataan Bantuan Hukum Dan Lain	100%	2.361.667.703	100%	1.962.833.562	-	-
Program Pemerataan Dan Dokumentasi Hukum	Pemerataan Pemerataan Dan Dokumentasi Hukum Yang Dilaksanakan	100%	635.903.026	-	-	-	-
Program Pengelolaan Administrasi Daerah, Kinerja	Nilai Efisiensi Manajemen Kinerja	80	706.406.006	81	607.154.324	-	-
Program Pengelolaan Pelayanan Produk Hukum Daerah	Pemerataan Pengelolaan Pelayanan Produk Hukum yang Dilaksanakan	-	-	100%	1.711.767.330	-	-
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Pemerataan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum yang Dilaksanakan Dalam Rangka Kegiatan Hukum	-	-	-	-	100%	4.132.736.415



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Realisasi Tahun					
		2018		2019		2021	
		Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
Program Peningkat Utusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	-	-	-	82,88	8.039.448.358
BIRO ORGANISASI							
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Indek Kepuasan Pelayanan Ke Terasukutan Peningkat Daerah	86	728.303.811	87	300.000.800	-	-
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Pelayanan Publik	Pemenuhan Peningkat Daerah yang Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan yang Berkualitas	77	308.163.608	78	34.308.300	-	-
Program Peningkatan Dan Pengembangan Reformasi Berkualitas	Pemenuhan Peningkat Daerah yang Meningkatkan Reformasi Berbasis Dengan Berkualitas	77	818.038.011	78	55.805.300	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Kemandirian Peningkat Daerah	Pemenuhan Peningkat Daerah yang Terakut Fungsi Dan Terakut Utusan (Right Sizing)	77	733.258.197	78	88.479.000	-	-
Program Peningkat Utusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemenuhan Tingkat Kepuasan Pelayanan Sistem Administrasi Utusan, Kelembagaan dan Aspek Lainnya Serta Pelayanan Pemerintahan Lingkungan Sekitar Provinsi Bali	-	-	-	-	81,5	5.707.108.732
Program Peningkat Organisasi	Pemenuhan Peningkat Daerah yang Reformasi Berkualitas	-	-	-	-	81	399.178.302
BIRO UMUM DAN PROTOKOL							
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Pemenuhan Layanan Administrasi Yang Ditingkatkan	88,13	44.248.882.193	87,13	43.754.954.780	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Indek Kepuasan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Sektor	81,82	1.133.408.819	84,42	1.357.270.134	-	-
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Gubernur Dan Wakil Gubernur	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Yang Ditingkatkan Dengan Berkualitas	78,19	7.254.872.888	-	-	-	-
Program Peningkatan Pelayanan Keprotektoran	Indek Kepuasan Pelayanan Dan Terakut Vp/Vip Terakut Pelayanan Keprotektoran	-	-	99,38	2.034.662.848	-	-
Program Peningkat Utusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Di Biro Umum Dan Protokol Sektor Provinsi Bali	-	-	-	-	88,77	73.482.912.862



BAB IV

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah dikaji dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program biro-biro.

Adapun Tujuan dan Sasaran dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali dijelaskan pada tabel 4.1 dan tabel 8.2 RPJMD yang menjelaskan indikator kinerja yang ada pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2018-2023.



Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran Jangka	Indikator	Satuan	KIDOKSI JANGKA			TARJUKSI			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Bali (mendapatkan nilai-nilai Sat Kerthi)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kota Bali (mendapatkan nilai-nilai Sat Kerthi)	Indeks Kepuasan Pelayanan Sat Kerthi	Indeks Nilai	NA	NA	NA	74	78	79	80
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor Publik	Persentase Peningkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	%	75%	76%	77%	78%	81%	83%	85%
Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi Kepuasan	Indeks Nilai	NA	57	70	71	81	82	83
		Persentase Lembaga Pemerintahan, Organisasi dan Masyarakat yang Terlibat	%	NA	25%	25%	35%	35%	75%	100%



Tipe	Sasaran RANTRA	Indikator	Satuan	KEMERDEKAAN		TANJUNGPURA				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja di Biro Umum dan Prinsipal serta Prinsipal Bali	Indeks Nilai	NA	95	90	80	81	82	85
		Persentase fasilitas dan koordinasi hukum yang disediakan dalam rangka kegiatan hukum	%	NA	NA	100	100	100	100	100
		Persentase Perputakaan yang tertinggal dengan nilai	%	-	-	-	50%	51%	52%	53%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai Skor LPPD Provinsi Bali	Nilai Skor	11	15	11	2	2.2	2.4	2.6
Membantu Kepala Daerah dalam Sekelompok Daerah dalam penyusunan	Tercapainya kinerja pengelolaan barang/jasa pemerintah yang menghasilkan nilai ekonomi	Indeks Nilai Kinerja Pengelolaan Barang Jasa Minimal Bali	Indeks	NA	70	75	80	85	90	95



Tipe	Sasaran Raker	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
kebijakan, pembinaan dan pendayagunaan pengabdian masyarakat serta pelaksanaan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan administrasi pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Terwujudnya peningkatan Bali yang beradaya yang dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai-nilai administratif pembangunan	Persentase kebijakan pelaksanaan yang dilaksanakan yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelaksanaan yang dilaksanakan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	NA	50	54	58	70	81	100



TABEL 4.2
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RPJMD SEMESTA BERENCANA

No.	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Misi 1 : MEMASTIKAN TERPELUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI															
	Tujuan : Terpehluhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak															
	Indikator Tujuan : 1. Tingkat Infansi Bali	Persen base ±1% (yoy)	Persen base (%)	5,5%	2,27		6,55		3,00% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)	
	2. Ketersediaan pangan utama	Persen base (%)	Persen base (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Sasaran :															
	1. Tersedianya pangan yang layak	Pangan yang layak	Persen base (%)	5,5%	2,27	31.257,33	6,55	34.511,42	3,00% ±1%(yoy)	33.555,23	3,00% ±1%(yoy)	34.295,74	3,00% ±1%(yoy)	37.035,08	3,00% ±1%(yoy)	
	Program :															
	1. Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Peningkatan kemampuan perencanaan yang dilaksanakan	Persen base (%)	N/A	100	51.481,25	100	248.331,44	100	338.655,73	100	372.795,74	100	410.035,08	100	Sekolah dan Dinas (Bhu PSLD)
1	Misi 11 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA BERKALA DAN BERKUALITAS BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT BAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, MANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH.															



Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sas Kertih															
Indikator of Tujuan	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,45 (2017)	N/A		N/A		71,56		71,56		74,56		74,56	
Sasaran :															
1. Meningkatkan kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sas Kertih	1. Penguatan Krama Bali yang mengimplementasikan nilai-nilai Sas Kertih dalam tata kehidupan sehari-hari	2. Sasaran	40	10,52	ARCT	NA	ARCT	66	ARCT	70	ARCT	66	ARCT	66	
	2. Penguatan Krama Bali yang melaksanakan tujuan Sas Kertih secara konsisten dalam seluruh siklus	2. Sasaran	70	NA	14.261,7 17.888	NA	11.467,5 27.410	76	14.116,5 90.468	80	14.260,0 00.000	85	15.500,0 00.000	89	
Program :															
1. Program Kewirausahaan Rakyat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sas Kertih	Indeks	N/A	N/A	14.261,7 17.888	74	11.467,5 27.410	76	14.116,5 90.468	77	14.260,0 00.000	78	15.500,0 00.000	79	Sas: Penguatan dan Kewirausahaan Rakyat
2. MIM 22	MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH BERSYARIAH														
2. Tujuan 2	MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH														
Indikator of Tujuan	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,16	69,31		69,49		71		72		73		73	
	2. Opini BPK	Status	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	



Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023-2025

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Persentase (%)	74,37	78		78,44		79		79,50		80		80		
Sasaran																
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks	75	82,07	12.537,0 83.400	79,6	5.373,28 6.712	80	14.276,5 92.805	81	15.916,2 89.701	82	17.000,0 88.134	82		
Program																
5	Program Pengembangan Rind	Nilai Evaluasi Kinerja	87	79	215.300 300	71	182.568 711	81	170.328 145	82	990.000 000	83	990.000 000	83	Sekretariat Daerah	
9	Program Fasilitas dan Koordinasi Hutan	Pembinaan fasilitas dan koordinasi hutan yang berkelanjutan dalam rangka kelestarian hutan	Persentase (%)	100	100%	5.694,44 1.265	100%	2.085,35 0.900	100%	4.541,01 7.824	100%	2.986,11 6.341	100%	5.494,00 1.265	100%	Biro Hutan dan Konservasi Hutan
10	Program Pemertanahan dan Operasi Daerah	Operasi Pemertanahan dan Operasi Daerah	Nilai Akor	15	11	535.000 000	16	400.485 840	1,5	1.851,75 3.157	2,1	1.650,00 0.000	1,2	1.850,00 0.000	2,2	Biro Pemertanahan dan Operasi Daerah
11	Program Peningkatan Organisasi	Pembinaan Peningkatan Organisasi yang Reformasi Efektif dan Berkualitas	Persentase (%)	75	77	1.785,36 8.520	78	175.881 200	81	554.545 245	83	632.448 200	82	600.000 000	85	Biro Organisasi
12	Program Ketersediaan dan Penguatan Berperangkat	Indikator Tata Kelola Kinerja Penguatan Berperangkat	Indeks	79	75	4.061,40 0.545	80	2.951,98 407	85	2.951,98 1.700	90	7.141,28 1.300	85	7.802,51 1.400	85	Sekretariat Daerah (Biro Penguatan Berperangkat)



Relevansi Pendidikan Saku Tahun 2018-2023

1	Program Kebudayaan Konservasi Peningkatan	Pembinaan ekonomi yang mendukung nilai-nilai kearifan yang berkeadilan	Persentase (%)	50	54	209.421 130	65	346.781 780	76	401.581 900	87	441.518 780	90	486.672 080	100	Seluruh daerah (Rp. C/C)
Sesuai :																
2	Program Pendidikan dan Peningkatan	Pembinaan daerah melalui Peningkatan Aset Daerah	Persentase (%)	5	4,35	514.875 780	5,75	126.406 210	5	407.429 220	5,5	181.172 060	6	529.388 360	6	Seluruh daerah (Rp. C/C)



4.2. Evaluasi terhadap Hasil Renstra

Evaluasi terhadap hasil Renstra berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 (Formulir E.54) yang menjelaskan tentang evaluasi terhadap hasil Renstra dilaksanakan dengan cara telaaahan terhadap Realisasi capaian indikator dan target kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada Sasaran RPJMD, realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja.

Berikut tabel 4.2 Formulir E.54



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Unit Pelaksana Jawab	
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021			
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
	Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	MASUKAN LPPD Provisi Bakti	Peringkat 15	15/23	2.035.753.000	P. 11	390.300.000	P. 10	1.148.950.485	3,8	2.745.130.300	P. 11	2.684.224.242	P. 10	1.587.540.294	2,4	117.55	1	657.38	1	135.43	1	3	Biro Perencanaan dan Kearsifan Raksat
		Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Pencapaian Kebijakan dan Tindakan yang mendukung pelayanan pemerintahan	100%	100%	555.390.000	100%	104.381.000	100%	452.544.390	100%	527.303.857	100%	124.002.350	100%	434.155.110	100%	95.01	1	99.75	1	53.75	1	4	Biro Perencanaan dan Kearsifan Raksat



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Unit Pelaksana Kerja	
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021			
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pencapaian Ketidakefektifan Otonomi Daerah yang dihindari anggot	100%	100%	102.860.000	100%	104.547.700	100%	104.430.600	100%	104.108.800	100%	104.700.040	100%	104.075.870	100%	104.410	100%	104.200	100%	104.000	100%	3	Biro Perencanaan dan Kearsifan Rakyat
		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Pencapaian Kerjasama Daerah yang dihindari anggot	25%	97%	1.157.700.000	25%	181.550.000	25%	200.160.200	25%	1.084.800.000	25%	18.000.000	25%	200.000.000	25%	18.000	100%	100	100%	100	100%	3	Biro Ekonomi dan Kearsifan Rakyat
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Melakukan Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan	94	75	94	94	930.094.700	75	930.094.700	77	94	94	930.094.700	75	930.094.700	77	94	93	93	93	93	93	3	Biro Perencanaan dan Kearsifan Rakyat



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Unit Pelaksana Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	7		
	Pemerintahan		Kecamatan Rakyat Serta Provinsi Bali																					
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pencapaian Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	100%	N/A	100 %	344.855.122	100 %	194.412.122	100 %	N/A	N/A	544.899.122	100 %	192.795.442		N/A		100 %	89 %	9 %	Dasar Perencanaan dan Kinerja Kecamatan Rakyat	
		Kegiatan Administratif Keuangan Perangkat Daerah	Pencapaian Layanan Administrasi Keuangan	N/A	100%	N/A		N/A		1.600.388.300	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	1.643.468.350		N/A		97 %	93 %	9 %	1 %	Dasar Perencanaan dan Kinerja



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Unit Pelaksana Jawab	
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021			
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			1. Peningkatan Daerah yang Berhasil Total Waktu																						Manajemen Rakyat
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemerintahan Kabupaten Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diawasi	N/A	100%	N/A	100 %	101.045.850,00	100 %	307.471.600	100 %	N/A	N/A	29.122.925,20	100 %	19.1594.62		N/A	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Biro Pemeliharaan dan Pengembangan Rakyat
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perumahan	Pemerintahan BMD yang Terawat	N/A	100%	N/A	100 %	230.180.000	100 %	488.598.845	100 %	N/A	N/A	289.080.000	100 %	253.614.146		N/A	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Biro Pemeliharaan dan Pengembangan Rakyat



No	Sektor	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Unit Pelaksana yang Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	7		
		g Urusan Pemerintahan Daerah																						
	Meningkatkan kualitas kehidupan di Bina Mental dan Spiritual	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan dan Layanan Prima Kardi	N/A	N/A	N/A	N/A	12.055.257.305	N/A	20.911.892.127		N/A	N/A	11.487.527.455		13.884.670.305		N/A	55.125		80.25	3	3	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Penerbitan Perangin Perangin Pembinaan Mental Spiritual		N/A	N/A	N/A	N/A	9.403.051.511	100%	10.528.475.558	100%	N/A	N/A	5.223.745.698,00	100%	5.907.362.374	100%	N/A	50.10		20.10	3	3	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Unit Pelaksana Jawab	
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021			
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Perkotaan: Pengembangan Kantor Pelayanan (Dinas) Yang Terintegrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	3.227.801.344	100 %	4.127.289.154	100 %	N/A	N/A	2.219.176.387,00	100 %	4.127.831.430	100 %	N/A	93,82	93,88	100	0	0	0	Biro Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
		Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Perkotaan: Pengembangan Kantor Non Pelayanan (Dinas) Yang Terintegrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	24.805.460	100 %	236.771.633	100 %	N/A	N/A	24.805.460	100 %	236.888.874	100 %	N/A	100,00	99,17	99	0	0	0	Biro Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Pemanggang Jarak	
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021			
						8		9		10		11		12		13		14		15		16			
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	7	
	Tertujuinya tata kelola pemerintahan yang baik	PROGRAM PENGELOLAAN AREP	- Nilai Evaluasi Kelembagaan - Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Terlibat Arep			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dim. Umum dan Partisipasi
		Kegiatan Pengelolaan Arep Online Dinas	Tertujuinya Penataan Arep			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Penyusunan Arep Online	Jumlah Arep Lembaga yang Arepnya Dimusnahkan N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Kegiatan Pengelolaan Arep Jaringan dalam Sistem Informasi Keperguruan	Reliabilitas Sistem Arep Pelayan Publik			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Rekomendasi Tingkat Provinsi																						
		Duk. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Akutis dan Layanan Kelembagaan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JKN	Jumlah pengguna Akutis yang Terlayani Jumlah Pengguna Akutis yang Terlayani Jumlah Pengguna Akutis yang Terlayani			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					NA	NA	
		Pembinaan Kaderisasi Unit Kelembagaan dan Lembaga Kelembagaan Daerah Provinsi	UAK dan UAK Kualitas Profesionalisme Perangkat Akutis di Perangkat Daerah dan Tenaga Perangkat Akutis			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					NA	NA	



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Pengukuran Jarak	
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021			
						8		9		10		11		12		13		14		15		16			
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	7	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN-DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Bina Umum dan Prinsipal Setda Provinsi Bengkulu	88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7348291	100	0	0	0	0	0	0	100	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2455525	100	0	0	0	0	0	0	100	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun dan melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2455525	100	0	0	0	0	0	0	100	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1838225	8	0	0	0	0	0	0	8	



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penganggu Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana dan Rincian Perangkat Daerah			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Anggaran ASN	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Anggaran ASN			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Sis. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD			0	0	0	0	392.473.354	12 Dokumen	0	0	0	0	392.473.354	12 Dokumen	0	0	0	0	392.473.354	12 Dokumen	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	0	0	0	345.193.579	100 Persen	0	0	0	0	345.193.579	100 Persen	0	0	0	0	345.193.579	100 Persen	
		Sis. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	0	0	345.193.579	21 Laporan	0	0	0	0	345.193.579	21 Laporan	0	0	0	0	345.193.579	21 Laporan	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	0	0	0	10.678.432.31	100 Persen	0	0	0	0	10.678.432.31	100 Persen	0	0	0	0	10.678.432.31	100 Persen	



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penangguhan Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Sus. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Rerak dan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Elemen/Rekayasa Bangunan			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	334.571.274	12 Bulan	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	462.270.204	12 Bulan	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	74.55	12 Bulan	
		Sus. Kegiatan Penyediaan Rerak dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Rerak dan Peralengkapan Kantor yang tersedia			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	2.893.488.885	3 Paket	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	2.398.887.402	3 Paket	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	80.91	3 Paket	
		Sus. Kegiatan Penyediaan Rerak Rumah Tinggal	Jumlah Rerak Rumah Tinggal yang tersedia			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	3.12.811.542	12 Bulan	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	486.172.119	12 Bulan	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	96.73	12 Bulan	
		Sus. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	589.991.958	12 Bulan	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	352.715.451	12 Bulan	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	59.59	12 Bulan	
		Sus. Kegiatan Penyediaan Bahan Baku	Jumlah Bahan Baku			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	378.008.000	12 Bulan	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	352.082.240	12 Bulan	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	93.51	12 Bulan	



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penganggu Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		dan Penelitian dan Pengembangan	Senyawa Tulah Katak dan																					
		Sub Kegiatan Fasilitas Katering Tema	Tersedianya Makanan dan Minuman, Rasio, Fasilitas dan Tama serta Aktivitas Lapangan						1.483.321.504	12 Bulan					1.383.775.6297	12 Bulan						34,31	12 Bulan	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD						3.671.533.104	12 Dokumen					2.688.305.170	12 Dokumen						73,50	12 Dokumen	
		Sub Kegiatan Penelaahan dan Ditinjau pada BKPD	Jumlah Dokumen Penelaahan dan Ditinjau pada BKPD						135.011.540	1 Dokumen					189.538.182	1 Dokumen						39,24	1 Dokumen	



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penganggu Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Sis. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada GPOD	Terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik			0	0	0	0	355.892.550	12 Dokumen	0	0	0	0	355.111.247	12 Dokumen	0	0	0	0	88,50	12 Dokumen	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyuplai & Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan & Daerah			0	0	0	0	13.450.340.100	300 Rokok	0	0	0	0	11.355.514.535	300 Rokok	0	0	0	0	83,98	300 Rokok	
		Sis. Kegiatan Penyediaan Jasa Curi Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia di lingkungan sebid			0	0	0	0	14.500.000	12 Dokumen	0	0	0	0	2.551.232	12 Dokumen	0	0	0	0	17,25	12 Dokumen	
		Sis. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, air dan listrik			0	0	0	0	1388.000.000	12 Dokumen	0	0	0	0	918.765.788	12 Dokumen	0	0	0	0	66,28	12 Dokumen	



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Pengukuran Jarak	
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021			
						Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Kantor							7.500.000.000	12 Dokumen					5.000.407.157	12 Dokumen						75,35	12 Dokumen	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Penyelenggaraan Umum Kantor	Jumlah dan Penyelenggaraan Umum Kantor							4.454.343.000	12 Dokumen					4.388.187.544	12 Dokumen						98,43	12 Dokumen	
		Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Milik Daerah dan Pemeliharaan Fasilitas Milik Daerah	Menyediakan Fasilitas Milik Daerah dan Pemeliharaan Fasilitas Milik Daerah							12.187.197.321	100 Persen					12.398.821.400	100 Persen						101,60	100 Persen	



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penganggu Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						8		9		10		11		12		13		14		15		16		
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	7
		Suasana Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan Bina Pemeliharaan dan Perekondisian Perawatan dan Perbaikan Fasilitas dan Fasilitas	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan yang dikelola oleh seld			N/A	N/A	N/A	N/A	1.770.121.800	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1.517.730.490	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	91,35	12 Dokumen	
		Suasana Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan Bina Pemeliharaan dan Perekondisian Perawatan dan Perbaikan Fasilitas dan Fasilitas	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional seld, jabatan yang dikelola oleh seld			N/A	N/A	N/A	N/A	4.898.104.990	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4.173.880.558	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	85,21	12 Dokumen	
		Suasana Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan Bina Pemeliharaan dan Perekondisian Perawatan dan Perbaikan Fasilitas dan Fasilitas	Terpeliharanya mobil			N/A	N/A	N/A	N/A	80.000.000	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	59.781.031	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	74,60	12 Dokumen	



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkoan Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penganggu Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Suatu Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor			N/A	N/A	N/A	N/A	8.653.175.046	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	8.103.478.459	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	85,38	12 Dokumen	
		Suatu Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi			N/A	N/A	N/A	N/A	1.107.532.484	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1.037.463.257	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	88,90	12 Dokumen	
		Kepolisian, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			N/A	N/A	N/A	N/A	5.686.514.364	100 Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	4.719.317.593	100 Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	83,34	100 Persen	



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Saat Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penganggu Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Sus Kegiatan Penyelenggaraan Turuntemu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Gak RH & WKDH			N/A	N/A	N/A	N/A	289.455.435	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	289.570.540	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	32,55	12 Dokumen	
		Sus Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Rutin/ang Cooradinal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Bids Rutin/ang Cooradinal RH & WKDH			N/A	N/A	N/A	N/A	4787.029.106	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4.380.000.000	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	30,30	12 Dokumen	
		Kegiatan Fasilitas Kermahligaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitas Kermahligaan Sekretariat Daerah			N/A	N/A	N/A	N/A	13.963.374.240	100 Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	13.990.800.000	100 Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	37,63	100 Persen	
		Sus Kegiatan Penyelenggaraan Rutin/ang Rutin/ang Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Rutin/ang Rutin/ang Kepala Daerah			N/A	N/A	N/A	N/A	12.008.374.240	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	11.268.000.000	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	31,64	12 Dokumen	



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Sus. Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Rumah Tangga Wali-Kecamatan Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga wali-kecamatan daerah			Rp	K	Rp	K	5.451.399.990	12 Dokumen	Rp	K	2.557.484.874	12 Dokumen	Rp	K	Rp	K	74,02	12 Dokumen			
		Sus. Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Rumah Tangga Kecamatan Daerah	Jumlah kegiatan kecamatan keagamaan			Rp	K	Rp	K	215.000.000	12 Dokumen	Rp	K	168.172.000	12 Dokumen	Rp	K	Rp	K	62,04	12 Dokumen			
		Kegiatan Fasilitas Media dan Komunikasi Pimpinan	Menyediakan Fasilitas Media dan Komunikasi Pimpinan			Rp	K	Rp	K	525.000.000	100 Persen	Rp	K	512.000.000	100 Persen	Rp	K	Rp	K	97,43	100 Persen			
		Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Anggota Timu VIP dan Wakil			Rp	K	Rp	K	525.000.000	12 Dokumen	Rp	K	512.000.000	12 Dokumen	Rp	K	Rp	K	97,43	12 Dokumen			



No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penganggu Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Kegiatan Fasilitas Keperawatan	Terselenggaranya Fasilitas Keperawatan			N/A	N/A	N/A	N/A	1.813.303.750	100 Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	1.354.332.277	100 Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	94,46	100 Persen	
		Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Akutis	Jumlah Dokumen Kegiatan Rongsoan dan Tandu			N/A	N/A	N/A	N/A	752.115.120	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	755.655.512	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	99,25	12 Dokumen	
		Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Fasilitas Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala			N/A	N/A	N/A	N/A	47.600.000	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	48900000	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	75,42	12 Dokumen	
		Pengelolaan Keuangan Keperawatan	Kepala Daerah yang Jember			N/A	N/A	N/A	N/A	755.763.015	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	755.007.251	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	98,75	12 Dokumen	



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangikan Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2018		2019		2021		2018		2019		2021		2018		2019		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	MENINGKATKAN KUALITAS KESUKSESAN DISIDANG HUKUM DAN HAM	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Pemenuhan fasilitas dan koordinasi hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum	100%	500	N/A	N/A	N/A	N/A	4.433.068.874	100	N/A	N/A	N/A	N/A	4.132.736.433	100	N/A	N/A	N/A	N/A	4.132.736.415	100	Sms Hukum
2		Kegiatan Fasilitas Penyediaan Penyandang Undangan	Pemenuhan Peraturan Penyandang Undangan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum	100%	500	N/A	N/A	N/A	N/A	1.666.140.330	100	N/A	N/A	N/A	N/A	1.666.487.230	100	N/A	N/A	N/A	N/A	1.666.487.230	100	Sms Hukum
3		Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	88 dokumen	321	N/A	N/A	N/A	N/A	1.359.154.868	48	N/A	N/A	N/A	N/A	1.321.936.480	73	N/A	N/A	N/A	N/A	1.321.936.480	73	Sms Hukum



Revisi RENCANA PENYAKIT SAKIT TAHUN 2019-2021

No	Esasran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Pengeluaran Dan/atau Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	7	8						10						15						
1		Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Produk Hukum Perencanaan (PH)	Jumlah Produk Hukum Perencanaan (PH) Dokumen	1800 dokumen	5500	N/A	N/A	N/A	N/A	147.905.790	28	N/A	N/A	N/A	N/A	166.386.587	112	N/A	N/A	N/A	N/A	188.388.357	112	Sim Hukam
2		Sub Kegiatan Pelayanan Produk Hukum dan Produk Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum (PH) Dokumen, atau Dokumen Informasi Hukunya	800 dokumen	775	N/A	N/A	N/A	N/A	118.533.754	43	N/A	N/A	N/A	N/A	118.434.154	132	N/A	N/A	N/A	N/A	118.434.934	132	Sim Hukam
3		Sub Kegiatan Fasilitas dan Fasilitas Produk Hukum Kepelayanan (PH) dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Produk Hukum Kepelayanan (PH) dan Fasilitas dan Fasilitas	25 dokumen	225	N/A	N/A	N/A	N/A	318.481.134	80	N/A	N/A	N/A	N/A	318.543.433	528	N/A	N/A	N/A	N/A	318.543.433	528	Sim Hukam
4		Kegiatan Fasilitas dan Fasilitas Produk Hukum	Persentase fasilitas dan/atau Produk Hukum yang dilaksanakan	100%	800	N/A	N/A	N/A	N/A	2.457.118.279	10	N/A	N/A	N/A	N/A	2.309.289.180	100	N/A	N/A	N/A	N/A	2.309.289.180	100	Sim Hukam



No	Eselon	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkan Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1		Suk Kegiatan Fasilitas Penyediaan Mesein Kultur yang Didesainkan	Jumlah Mesein Kultur yang Didesainkan	29 Kesen	154	N/A	N/A	N/A	N/A	3.107.471.432	35	N/A	N/A	N/A	N/A	1.871.572.039	20	N/A	N/A	N/A	N/A	1.871.572.039	20	8ms Kultur
2		Suk Kegiatan Fasilitas Penyediaan Mesein Non Ujap dan Hald yang Didesainkan	Jumlah Mesein Non Ujap dan Hald yang Didesainkan	3 Kesen	43	N/A	N/A	N/A	N/A	380.448.764	8	N/A	N/A	N/A	N/A	337.597.544	11	N/A	N/A	N/A	N/A	337.597.544	11	8ms Kultur
3		Program Peluang Usaha Persektor - Daerah Perkota	Nilai Ekspor Manajemen Kinerja	30	404	N/A	N/A	N/A	N/A	1.224.363.470	81	N/A	N/A	N/A	N/A	1.662.989.125	81	N/A	N/A	N/A	N/A	1.662.989.125	81	8ms Kultur
4		Kegiatan Administrasi Umum Persektor Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan	100	300	N/A	N/A	N/A	N/A	119.877.355	15	N/A	N/A	N/A	N/A	111.731.352	100	N/A	N/A	N/A	N/A	111.731.352	100	8ms Kultur
5		Suk kegiatan Penyediaan Komponen Infrastruktur Lainnya Persektor	Jumlah Persektor Komponen Infrastruktur Lainnya Persektor	1 Kesen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	3.349.530	1	N/A	N/A	N/A	N/A	3.349.530	1	N/A	N/A	N/A	N/A	3.349.530	1	8ms Kultur



Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023

No	Esasran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tetapan Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Tetapan Rencana Peranginan Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	7	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Bengkok Kantor	Bengkok Kantor yang Disediakan																					
2		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1 paket	14	0 A	0 A	0 A	0 A	50.004.700	1	0 A	0 A	0 A	0 A	50.004.562	1	0 A	0 A	0 A	0 A	50.004.562	1	
3		Sub kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Belanja Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	17	0 A	0 A	0 A	0 A	20.000.700	2	0 A	0 A	0 A	0 A	20.004.700	2	0 A	0 A	0 A	0 A	20.004.700	2	
4		Penyediaan Rasio Koordinasi dan Komunikasi DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Rasio Koordinasi dan Komunikasi DPRD	1	18	0 A	0 A	0 A	0 A	22.174.000	1	0 A	0 A	0 A	0 A	22.174.000	1	0 A	0 A	0 A	0 A	22.174.000	1	



Revisi Lembar Perencanaan Salin Tahun 2019-2021

No	Eselon	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Peranginan Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
3		Kegiatan Pemeliharaan & Boring Salin Daerah Perhubungan Udara Persekiptan & Daerah	Pemeliharaan boring milik daerah dalam kondisi baik	100	800	N/A	N/A	N/A	N/A	1.108.125.820	10	N/A	N/A	N/A	N/A	341.257.873	100	N/A	N/A	N/A	N/A	341.257.873	100	Sis. Harum
1		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Bore Pemeliharaan & Bor Rejam Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan Diperbaiki	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan Diperbaiki	1 unit	15	N/A	N/A	N/A	N/A	474.000.144	4	N/A	N/A	N/A	N/A	306.357.780	4	N/A	N/A	N/A	N/A	306.357.780	4	Sis. Harum
2		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Bore Pemeliharaan & Rejam dan	Jumlah Kendaraan Dinas Perawatan atau Lapangan yang	11 unit	52	N/A	N/A	N/A	N/A	347.585.376	5	N/A	N/A	N/A	N/A	225.712.393	5	N/A	N/A	N/A	N/A	225.712.393	5	Sis. Harum



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023

No	Esasran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangikan Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	2	3	4	5	7	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
		Perjanan Kerjasama Dinas Operasional Mda Lainnya	Doelhare dan Disyapkan Raka dan Perishannya																					
3		Sub kegiatan Pemeliharaan & Mebel	Jumlah Mebel yang Doelhare	2 unit	12	0	0	0	0	3.000.000	2	0	0	0	0	3.544.800	2	0	0	0	0	3.544.800	2	
4		Sub kegiatan Pemeliharaan & Perawatan dan Mebel Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mebel Lainnya yang Doelhare	15 unit	254	0	0	0	0	12.500.000	69	0	0	0	0	12.098.400	69	0	0	0	0	12.098.400	69	



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Realisasi Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
	Tenaga ahli/kelembagaan pemerintah yang ahli	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Indeks Kepuasan Pelayanan Ke Tatausahaan Perangkat Daerah			818.000.000,00	98	101.379.500,00	97	0	0	728.113.811	98	100.000.000,00	97			99%	100%	99,5%	100%			ERO ORGANISASI
		Kegiatan Penyediaan jasa konsultasi keuangan	Kondisi dan Ketersediaan kondisi bank dan tiap tahun			5.000.000,00	1 tahun	0	0	0	0	5.000.000,00	1 tahun	0	0			100%	100%	100%	0%			
		Kegiatan Penyediaan Aset Tetap Kantor	Aset Tetap Kantor yang Disediakan			30.442.100,00	1 tahun	10.390.100,00	1 Tahun	0	0	20.370.400,00	1 tahun	10.390.100,00	1 Tahun			99,7%	100%	100%	100%			



No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit/ Penas Spang Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Kepala Penyediaan Sarung Celak dan Pengondan	Sarung Celak dan Pengondan yang tersedia			1.000.000	1 tahun	13.883.900	1 Tahun	0	0	6.938.200	1 tahun	13.883.300	1 Tahun			89,97%	100%	100%	100%			
		Kepala Penyediaan Kompleks Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1. Pemeliharaan Listrik dan Peralengkapannya di Bina Cipta 2. Sarana Kompleks Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor			5.000.000	1 tahun	0	1 Tahun	0	0	5.000.000	1 tahun	0	1 Tahun			100%	100%	100%	100%			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	sarana dan peralatan yang tersedia			26.000.000	1 tahun	0	0	0	0	23.889.200	1 tahun	0	0			91,9%	100%	100%	-			
		Kepala Rencan Rencan	Pelaksanaan Rencan Rencan Koordinasi dan			436.858.500	1 tahun	21.774.800	1 tahun	0	0	339.735.081	1 tahun	21.774.800	1 tahun			89,33%	100%	100%	100%			



No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit/ Penas/ Spang/ Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Koordinasi dan Sinergitas ke: Daerah dan Luar Daerah	Konsultasi pada Elm Organisasi																					
		Kepala Perangkat man Rutin Ber- kita Gedung Kantor	Gedung Kantor yang diperbaiki			5.000.000,0	1 tahun	0	1 Tahun	0	0	5.000.000	1 tahun	0	1 Tahun			100,00%	10,00%	100,00%	10,00%			
		Kepala Perangkat man Rutin Ber- kita Kendaraan + Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diperbaiki			200.000.000	8 unit Kend. roda 4 dan 10 unit Kend. roda 2	238.454.900	8 unit roda 4 dan 11 unit roda 2	0	0	200.000.000	8 Unit roda 4 dan 11 unit roda 2	234.551.000	8 Unit roda 4 dan 11 unit roda 2			100,72%	10,00%	99,47%	10,00%			
		Kepala Perangkat man	Perbaikan Kantor yang Diperbaiki			35.000.000,00	1 tahun	17.000.000	1 tahun	0	0	35.000.000	1 tahun	17.000.000,00	1 tahun			100,00%	10,00%	100,00%	10,00%			



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023

No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Rutin Berada di Kantor Gedung Kantor																						
		Kepala Perwakilan Rutin Berada di Kantor	Meubelur yang Dipelekar			7.000.000	1 tahun	0,00	1 tahun	0	0	7.000.000	1 tahun	0,00	1 tahun			100,00%	10,0%	0,00%	10,0%			
		Kepala Perwakilan Rutin Berada di Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja			10.000.000	3 Dokumen	2.248.800	3 Dokumen	0	0	10.000.000	3 Dokumen	2.248.800	3 Dokumen			100,00%	10,0%	100,00%	10,0%			
		Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Baik			411.014.000	77%	34.000.000,00	79%	0	0	336.103.800	77%	34.000.000,00	79%			81,29%	10,0%	100,00%	79%			



No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Pengumpul Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Pelayanan Publik																						
		Kegiatan Peminaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sel.	Laporan Pemantauan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sel.			82.544.000	1 Laporan	17.987.500	1 Laporan	0	2	78.728.000	1 Laporan	17.987.500	1 Laporan			95,9 %	100 %	100 %	100 %			
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang Membangun SI - WSK			80.000.000	1 OPD	1.490.400	1 OPD	0	2	48.545.900	1 OPD	1.490.400	1 OPD			90,4 %	100 %	100 %	100 %			
		Kegiatan Pemantauan dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik			80.830.000	38 OPD	1.072.400	38 OPD	0	2	54.597.800	38 OPD	1.072.400	38 OPD			93,3 %	100 %	100 %	100 %			



No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penasip Barang
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						1		2		3		4		5		6		7		8		9		
1	2	3	4	5	7	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		0. Lingkup an Pemerintah n Provinsi Sel																						
		Kepala Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik			50.000.000	1 Laporan an	553.300	1 Laporan an	0	0	37.832.400	1 Laporan an	553.300	1 Laporan an			420.4%	100.0%	100.0%	99.9%			
		Kepala Pembinaan dan Monitoring	Laporan Pembinaan dan Monitoring			130.362.000	1 Laporan an	13.064.900	1 Laporan an	0	0	119.743.700	1 Laporan an	13.064.900	1 Laporan an			913.6%	100.0%	100.0%	99.9%			



No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi dengan Baik			952.354.000	77%	55.903.900	19%	0	0	143.033.000	77%	55.903.900.00	19%			55.903.900	100%	100%	75%			
		Kepala Relawan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Provinsi Bengkulu	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1. Laporan 1 Dokumen 2. Dokumen Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan Tepat Waktu Jember Bengkulu dan Bengkulu 2. Dokumen Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan tepat waktu			102.579.000	1 Laporan dan 1 Dokumen	15.715.400	2 Buku	0	0	163.745.000	1 Laporan dan 1 Dokumen	15.715.400.00	2 Buku			15.715.400	100%	100%	100%			



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023

No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penasip Barang
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Kepala Pelaksana dan Riset dan Reformasi Birokrasi	1. Road MAP RE Tahun 2019-2023 2. Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi & Peningkatan Perangkat Daerah yang Menempatkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan Baik, Birokrasi Prima, dan			436.940.000	1 Dokumen 1 Laporan	53.643.500	75%	0	0	436.270.000	1 Dokumen 1 Laporan	53.643.500,00	75%			83,44%	100%	100%	75%			
		Kepala Pemasangan Gudang Kertas di Lingkungan Pemerintah & Provinsi Bengkulu	Pemasangan Perangkat Daerah yang menandatangani 50% Indeks Kertas yang Baik			57.578.000	80%	50.547.400	82%	0	0	57.534.000	83	50.547.400,00	82%			74,82%	100%	100%	83%			



No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Pengukuran Jangka
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS Sede	Jumlah PNS/Sede yang Ditugaskan Jumlah ASN yang Administrasi Kepegawaian Bak dan Terak Terak Kedis 2 Jumlah ASN yang Administrasi Kepegawaian Bak dan Terak Terak Kedis			182.178.000	540 orang	4.338.100	10	0	0	113.050.000	640 orang	4.338.100.00	10			143 %	10 %	100 %	10 %			
		Kegiatan Pelayanan Gedung Dipin Nasional (GGN)	Laporan Pelayanan Gedung Dipin Nasional (GGN)			113.361.000	1 Laporan					70.344.000	1 Laporan	0,00	0			81,9 %	10 %	0,00 %	0 %			



No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Provinsi Bengkulu	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Jumlah Dokumen Rencana dan Rencan Provinsi Bengkulu yang disusun dan diselesaikan tepat waktu					11.382.500	1 Dokumen	0	0		0	11.382.500	1 Dokumen			40,10%	0%	100,00%	100%			
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (Right Sizing)			366.100.000	77%	89.479.000	79%	0	0	730.208.687	77%	89.479.000,00	79%			35,46%	77%	100,00%	79%			
		Kepala Penjabat dan Kepala Dinas	Dokumen Nis. Jelaskan dan Dokumen Kelembagaan Dokumen Nis. Jelaskan dan Dokumen Kelembagaan			147.178.000	1 Dokumen	22.872.800	1 Dokumen	0	0	147.178.000	1 Dokumen	22.872.800,00	1 Dokumen			100,00%	100%	100,00%	100%			



No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Kepala Evaluator Perangkat Daerah Provinsi Riau	Documentasi Evaluator Perangkat Daerah Provinsi Riau			180.378.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	0	0	159.230.400	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan			84,3 6%	10 0 %	100, 00%	10 0 %			
		Kepala Pemantauan dan Pengendali Kapasitas	Jumlah Kapasitas yang Guna			150.330.000	5 Kap. Kota	27.000.000	5 Kap. Kota	0	0	140.201.200	5 Kap. Kota	27.000.000,00	5 Kap. Kota			84,3 4%	10 0 %	100, 00%	10 0 %			
		Kepala Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah			117.178.000	38 Dokumen	1.554.400	38 Dokumen	0	0	140.201.200	38 Dokumen	1.554.400,00	38 Dokumen			121, 43%	10 0 %	100, 00%	10 0 %			
		Kepala Penyusunan Analisis Jabatan Struktur Organisasi	Jumlah Dokumen Analisis dan ASK Perangkat Daerah			155.764.000	38 Dokumen	18.413.000	38 Dokumen	0	0	140.201.200	38 Dokumen	18.413.000,00	38 Dokumen			89,3 8%	10 0 %	100, 00%	10 0 %			



No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi/Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERIMA DAERAH PROVINSI I	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali							6.324,8 10.734	91,5 %					6.707,1 10.730	91,5 %					6.707,1 10.730	91,5 %	100,00%
		Pelayanan, Penganggaran, dan Eksekusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penganggaran Eksekusi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai peraturan dan dilaksanakan tepat waktu							4.303,8 00	1 Dokumen					4.602,9 00	5 Dokumen					4.602,9 00	54,4 %	100 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan dilaksanakan tepat waktu							1.225,4 10.500	5 Dokumen					1.100,9 10.500	5 Dokumen					1.100,9 10.500	88,3 %	100 %



No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi/ Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu							3.188.385	13 Dokumen					3.188.385	13 Dokumen					100,00%	100%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Sarung MUA Daerah Perumpan & Utusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pertunjukan yang diindikasikan tepat waktu							112.000.000	100%					98.927.000	100%					88,37%	100%	
		Pemeliharaan Sarung MUA Daerah Perumpan & Utusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarung MUA Daerah pada Bina Organisasi yang berfungsi baik dan terawat							402.900.000	1 Laporan					402.900.000	1 Laporan					100,00%	100%	
		PROGRAN PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik							192.800.000	81%					209.170.000	81%					93,72%	100%	



No	Sarana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Penetapan Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	10
		Penyediaan Kendaraan dan Angkutan Jalan	Penyediaan Kendaraan yang dapat mengangkut barang dan penumpang							140.000.000	01%					137.110.000	01%					133.32%	100%	
		Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Penyediaan Perangkat Daerah yang dapat melaksanakan Rencana Strategis							100.000.000	01%					92.057.000	01%							



No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Pengeluaran Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Pengukuran Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						E	K	R	K	E _p	K	R	K	R	K	R	K	E _p	K	R	K	R	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nila Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LUPP)	100%		-	-		11.757.525 E 01	100 %	-	-		10.345.499 E 25	99,91 %	-	-					11.757.525 E 01	100 %	Sms Pengadaan barang/jasa
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kegiatan Pelaksanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Transparansi & pemerataan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		-	-		1.248.000	100 %	-	-		357.500	100%	-	-					1.248.000	100 %	Sms Pengadaan barang/jasa
3		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Transparansi & administrasi keuangan perangkat daerah	100%		-	-		9.681.455 E 01	100 %	-	-		9.699.232 E 03	100%	-	-					9.681.455 E 01	100 %	Sms Pengadaan barang/jasa
4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Transparansi & Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		-	-		1.445.988 E 02	100 %	-	-		1.161.778 E 03	94,96 %	-	-					1.445.988 E 02	100 %	Sms Pengadaan barang/jasa



No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Pengeluaran Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Pengukuran & Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						R	K	R	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
						R	K	R	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	
5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdapatnya & Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		-	-	-	-	295.800.000	100 %	-	-	-	-	295.453.400	100%	-	-	-	-	295.800.000	100 %	Smp Pengadaan barang/jasa
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdapatnya & Pemeliharaan & Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		-	-	-	-	333.950.000	100 %	-	-	-	-	223.954.818	100%	-	-	-	-	333.150.000	100 %	Smp Pengadaan barang/jasa
7	Tersedianya informasi pemerintahan yang baik	PROGRAM KEBERUKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persediaan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100%		-	-	-	-	6.641.707.25	100 %	-	-	-	-	6.380.201.77	85,91 %	-	-	-	-	6.641.707.25	100 %	Smp Pengadaan barang/jasa
8		Kegiatan pengelolaan Pengadaan	Terdapatnya & Pengadaan	100%		-	-	-	-	6.402.758.90	100 %	-	-	-	-	5.783.021.77	100%	-	-	-	-	6.402.758.90	100 %	Smp Pengadaan barang/jasa



No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Peranginan Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Unit Pengukuran & Jarak
						2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		
						E	K	R	K	E _g	K	R	K	R	K	E _g	K	R	K	R	K	E _g	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Berang dan Jarak	Pengadaan Berang dan Jarak																					
8.		Kegiatan Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terdapatnya & Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100%		-		-		339.535.459	100 %	-		-		339.535.459	39,28 %	-		-		339.535.459	100 %	510 Pengadaan barang/jasa
10.		Kegiatan Pembiayaan dan Administrasi Pengadaan Berang dan Jarak	Terdapatnya & Pembiayaan dan Administrasi Pengadaan Berang dan Jarak	100%		-		-		149.415.000	100 %	-		-		149.415.000	100%	-		-		149.415.000	100 %	510 Pengadaan barang/jasa



4.1 Capaian IKU Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Iku adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Setiap Perangkat Daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra.

Tujuan IKU untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih perangkat daerah tersebut, ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah tersebut.

INDUKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | MENGAJUKAN PADA RPJMD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

Penyaji Data : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali

KINERJA UTAMA (ATAU TUJUAN/SAHABAT STRATEGIS/HASIL/OUTCOME)	INDUKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN					PENJELASAN (ALASAN)	PENJELASAN FORMULA (CARA PENGUKURAN)	SUMBER DATA	KETERANGAN/REKOR TERIS
		2018	2019	2021	2022	2023				
1	2	3					4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.	Meningkatnya Peningkatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Bali	Peningkat 11 (Pita/Angka)	Peningkat 20 (Pita/Angka)	Skor/100(3,0)	Skor/100(3,1)	Skor/100(3,2)	Mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pada 89 ayat (1) dan Pada 74, LPPD merupakan dokumen penting kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam kinerja.	Peningkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Peningkat LPPD Provinsi Bali diukur dari peningkatan skor Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Indeks kesesuaian mutu (IKM) dan Indeks Capaian Kinerja (ICK) yang terdiri dari 1) Tatahar Pengantar kebijakan : dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 12 aspek. 2) Tatahar Pelaksanaan Kebijakan : Skor administratif umum dilakukan terhadap kinerja DPRD yang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebanyak 3 (delapan) aspek. 3) Tatahar Pelaksanaan kebijakan : urusan pemerintahan dilakukan terhadap kinerja DPRD yang mendapatkan 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan.	Peningkat Daerah Provinsi Bali dan Data dan Kabupaten Kota : Pokon Kinerja 2023, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan Penetapan Kinerja dan Target Capaian Program Kegiatan Tahun 2020	
Peningkatnya Tercapainya Indeks Bali Bersasman (IIB) Nilai Bad' Kertir	Indeks Keputus Layanan Alim Kertir	N/A	N/A (74)	N/A (75)	N/A (76)	N/A (80)	Kegiatan Bina Harta dan Spiritual di Provinsi Bali dilakukan pada Upaya Optimalisasi pelayanan Alim Kertir di Provinsi Bali yang mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan Energi serta Rasa keagamaan Berkeadilan umat Hindu	Survey Persepsi Persepsi Layanan Alim Kertir (Peningkat dan Peningkatan Pura) mengacu pada Peraturan Survey Kabupaten Kabupaten (SKK) dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 2017. Pelaksanaan Survey dan Pura Kertir (Akademi UIN-3 Denpasar) yang sekitar 130 responden yang mencakup Peningkat dan Peningkatan Pura di Bali dan Luar Bali. Adapun Instrumen disusun terdiri dari Instrumen dasar dan tambahan sesuai dengan yang dilaksanakan.	Pokon Kinerja 2020, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan Penetapan Kinerja dan Target Capaian Program Kegiatan Tahun 2020	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

No	Kinerja Utama atau Tujuan/ Sasaran Strategis/ Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2		4	5		7	8
1.	Meningkatkan Kualitas Kelengkapan di Bidang Hukum dan HAM	Persentase kebijakan hukum dan HAM yang dipaparkan dalam rangka kepastian hukum	Persentase	Berikut adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perpres Nomor 83 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Perpres Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kementerian Negara, Perpres Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian PANRB, PermenPAN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Peraturan Tatakelola (Business Process), PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional, Prosedur Administrasi Pemerintahan	Jumlah kebijakan hukum dan HAM yang dipaparkan dibagi jumlah draft kebijakan hukum dan HAM yang diajukan SKPD dan Pem. Kab./ Kota x 100%	Biro Hukum Setda Provinsi Bali	Keseluruhan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BALI

- Tugas Pokok** :
1. Terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali minimal baik dalam menunjang visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Bali
 2. Terwujudnya perekonomian Bali yang berdaya saing dan berkelanjutan serta meningkatkan tertib administrasi pembangunan

- Fungsi** :
- Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan pembinaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa serta perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan administrasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan (Alasan)	Penanggungjawab	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Minimal Baik dalam menunjang visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Bali	Persentase rata-rata Pemanfaatan Sistem PBJ (SIRUP, E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing, Non-E-Tendering, Non-E-Purchasing, E-Kontrak)	a. $\frac{\text{SIRUP}}{\text{Jumlah GPD yang mengumumkan RUP tepat waktu dibagi Jumlah GPD}} \times 100$	Persentase ketepatan waktu dan nilai anggaran RBJ yang diumumkan dalam SIRUP (nilai RUP).	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	SPSE, E-Purchasing dan Bela Pengadaan	
			b. $\frac{\text{E-Tendering/E-Seleksi}}{\text{Jumlah paket E-tendering/E-seleksi yg diproses sesuai RUP total paket}}$	Proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/Pemda dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.			

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan (Alasan)	Pemangungjawab	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			e-tendering/e-seleksi x 100				
			E-Purchasing : Jumlah total paket pengadaan melalui Katalog dan toko daring : status selesai : Jumlah total paket katalog dan toko daring X 100	E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Katalog Elektronik atau Toko Daring			
			Non E-Tendering & Non E-Purchasing Jumlah total paket non e-tendering dan Non e-purchasing melalui SPSE : Jumlah paket Non E-tendering dan Non e-purchasing X 100	Ruang lingkup Non E-Tendering dan Non-E-Purchasing adalah proses pemilihan dengan metode Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan IKPP baik melalui transaksional ataupun pencatatan			
			E-Kontrak : Jumlah total paket yang menerapkan E-Kontrak Jumlah total kontrak X 100	Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak			

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan (Alasan)	Petanggungjawab	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE			
		Persentase Ketarifan Jabatan Fungsional PBJ terhadap Formasi yang sudah Mendapatkan Rekomendasi	Jumlah JF PPBJ Formasi JF PPBJ x 100	(KULPemas) Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDMPBJ dilakukan dengan cara membandingkan jumlah JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dan LKPP	Bagian Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	
		Tingkat kematangan lembaga UNPBJ	Jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (6 variabel)	Menggunakan hasil data yang diambil dari aplikasi SIMKJ yang diakses melalui https://www.slukobj.lkpp.go.id	Bagian Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	
		Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan barang/jasa (ketepatan waktu, biaya, kualitas dan layanan)	Capaian realisasi kinerja PBJ Target Kinerja PBJ x 100	Mengukur hasil pengadaan barang/jasa yang dapat menunjang capaian tujuan organisasi aspek waktu, biaya, kualitas mutu dan tingkat kepuasan layanan)	Bagian Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	SPSE dan Hasil Money PBJ	

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan (Alasan)	Pemangungjawab	Sumber Data	Kel.
1	2	3	4	5	6	7	8

2	Terwujudnya Perekonomian Bali yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Meningkatkan Tertib Administrasi Pembangunan	Persentase rata-rata Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan sesuai ketentuan	Capaian tindak lanjut kebijakan target kinerja $\times 100$	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Unit Substansi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Unit Substansi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
---	---	--	---	---	--	--	--

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI**

Tugas Pokok

Memberu Pimpinan dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Teknis terkait Kerumahtanggaan, Keuangan dan Aset Setda, keprotokolan serta Pengelolaan arsip baik secara digital maupun manual

Fungsi

Menyelenggarakan pelayanan di bidang Kerumahtanggaan, Keuangan dan Aset Setda, keprotokolan serta Pengelolaan arsip baik secara digital maupun manual yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional dan responsibel

NO	KINERJA UTAMA/OUTCOME/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Kepuasan}}{\text{Jumlah Permohonan}} \times 100$	Pimpinan, SKPD, Stake Holder dan Tamu Proximal	Biro Umum dan Protokol
2.	Terwujudnya Arsip Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang Diusulkan Sesuai NPK	Indeks Kearsipan	1. Ketepatan Peraturan Perundang-Undangan 2. Program Kearsipan 3. Pengolahan Arsip Inaktif dengan Retensi Seturang-Kurangnya 10 Tahun 4. Penyusutan Arsip 5. Pengelolaan Arsip Statis 6. Sumber Daya Manusia Kearsipan 7. Kelembagaan 8. Sarana dan Prasarana Kearsipan	OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota	Biro Umum dan Protokol

INDIKATOR KINERJA UTAMA **BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI BALI**

TUGAS POKOK Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatakelola

FUNGSI Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

NO.	KINERJA UTAMA / OUTCOME/	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat	1. Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	$\frac{\text{Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Rampasan, OPD, Stake Holder, dan Masyarakat	BIRO ORGANISASI
		2. Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah perpustakaan se-Bali}} \times 100\%$	Rampasan, OPD, Stake Holder, dan Masyarakat	BIRO ORGANISASI



4.4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN TAHUN 2019-2021

Biro Pemkesra

NO	URUSAN	INDIKATOR	2019	2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Sekretariat Daerah	Nilai Skor LPFD Provinsi Bali	15	9	2,2	2,2	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi	NA	74	78	78	104%
		Nilai Evaluasi Manajemen	NA	75	76	80,25	105%

Biro Umum dan Protokol

NO	URUSAN	INDIKATOR	2019	2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PEMERINTAHAN, BIDANG KEARSIFAN	Nilai Evaluasi Kebersihan	70	71	61		
		Persentase Lembaga Pemerintahan, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Administrasi	25%	30%	50%		
2	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja di Biro Umum dan Protokol serta Pelayanan Publik	35	66	81	80,77	100%

Biro Hukum

NO	URUSAN	INDIKATOR	2019	2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG DITELESAKAN DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM	100%	100%	100%	100%	100%



Biro Organisasi

NO	URUSAN	INDIKATOR	2019	2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertolong dengan Baik	0%	50%	31%	51	100
2	URUSAN UNDER PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Budaya Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi	83 Nilai	83,5 Nilai	84 Nilai	84	100
		Persentase Peningkatan Daerah yang Reformasi Birokrasi yang baik	77%	79%	81%	81	100

Biro PBJEK

NO	URUSAN	INDIKATOR	2019	2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	URUSAN UNDER PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Budaya Manajemen Kinerja	80,13	81,5	82	85,23	100
		Indeks Tasa Kelola Kinerja Penguasaan Barang-Jasa minimal Baik	75	80	85	99,90	100
		Persentase Labiliterasi peminatan yang diindikasikan	100	100	100		
		Persentase Daerah tertutup Penerimaan Aul Daerah	4,23	5,78	3		
		Persentase efektivitas yang diindikasikan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku	34	45	70		



BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis Provinsi Bali tahun 2018-2023 mengacu kepada Peraturan

Presiden Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Bali yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Bali. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Bali. Harus dipematikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus dilaksanakan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKjP) ini akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.



5.2 REKOMENDASI

Evaluasi terhadap Renstra 2018-2023 mengadu pada permasalahan yang dihadapi serta kebijakan pemerintah tentang penanganan covid-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019, telash terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap pendanaan (dikaiti Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali).
2. Untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 80 Tahun 2019.
3. Untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator sasaran.
4. Perlu adanya revisi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.